



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 900/Kep.330-BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 900/KEP.98-BPKAD/2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.98-BPKAD/2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.315-BPKAD/2021;

b. bahwa dengan adanya pengangkatan dan alih tugas di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 900/Kep.98-BPKAD/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); dan
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.98-BPKAD/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.315-BPKAD tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.98-BPKAD/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.98-BPKAD/2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.315-BPKAD/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.98-BPKAD/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2021



GUBERNUR JAWA BARAT,


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A1. DAFTAR NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN PEJABAT KUASA PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO	KODE REKENDIG KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.
1	2	3	4	5	6
1	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
	01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	2.16.01	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadli Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
2	2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadli Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
4	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	T. Sukmana NIP. 19660107 198801 1 003 Pengatur (II/c) Pelaksana	
5	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadli Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	

NO	KODE REKENING KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.
1	2	3	4	5	6
6	2.16.01.1.06 2.16.01.1.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadi Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
7	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadi Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
8	2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadi Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
9	2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadi Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
10	2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadi Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
11	2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadi Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	

NO	KODE REKENING KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.
1	2	3	4	5	6
12	2.16.01.1.07 2.16.01.1.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Mebel	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadli Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
13	2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadli Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
14	2.16.01.1.08 2.16.01.1.08.01	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadli Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
15	2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadli Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
16	2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadli Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
17	2.16.01.1.09 2.16.01.1.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadli Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	
18	2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gilang Sailendra, S.STP., M.Si NIP. 19780321 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	Hadli Sutisna NIP. 19771111 201412 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pelaksana	

NO	KODE REKENING KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.
1	2	3	4	5	6
19	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			
	2.16.02.101	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			
	2.16.02.101.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Faiz Rahman, S.STP NIP. 19840911 200212 1 001 Penata Tingkat I (III/d) Kabid Informasi Komunikasi Publik	Adi Setiadi Ramdhani, A.Md NIP. 19840510 201001 1 002 Penata Muda (III/a) Pelaksana	
	2.16.02.101.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Faiz Rahman, S.STP NIP. 19840911 200212 1 001 Penata Tingkat I (III/d) Kabid Informasi Komunikasi Publik	Adi Setiadi Ramdhani, A.Md NIP. 19840510 201001 1 002 Penata Muda (III/a) Pelaksana	
	2.16.02.101.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Faiz Rahman, S.STP NIP. 19840911 200212 1 001 Penata Tingkat I (III/d) Kabid Informasi Komunikasi Publik	Adi Setiadi Ramdhani, A.Md NIP. 19840510 201001 1 002 Penata Muda (III/a) Pelaksana	
	2.16.02.101.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Faiz Rahman, S.STP NIP. 19840911 200212 1 001 Penata Tingkat I (III/d) Kabid Informasi Komunikasi Publik	Adi Setiadi Ramdhani, A.Md NIP. 19840510 201001 1 002 Penata Muda (III/a) Pelaksana	
	2.16.02.101.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Faiz Rahman, S.STP NIP. 19840911 200212 1 001 Penata Tingkat I (III/d) Kabid Informasi Komunikasi Publik	Adi Setiadi Ramdhani, A.Md NIP. 19840510 201001 1 002 Penata Muda (III/a) Pelaksana	
24	2.16.02.101.11	Penguatan Tata Kelola KI di Daerah	Faiz Rahman, S.STP NIP. 19840911 200212 1 001 Penata Tingkat I (III/d) Kabid Informasi Komunikasi Publik	Adi Setiadi Ramdhani, A.Md NIP. 19840510 201001 1 002 Penata Muda (III/a) Pelaksana	

NO	KODE REKENING KEHATAN	NAMA KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.
1	2	3	4	5	6
25	2.16.03 2.16.03.1.01	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	DR. Purnomo Yustianto, ST., MT NIP. 19720528 200501 1 004 Pembina (IV/a) Kabid Aplikasi Informatika	Kusyadi NIP. 19710527 200701 1 008 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
	2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi			
26	2.16.03.1.02 2.16.03.1.02.01	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dian Istanti, S.Sos., M.AP NIP. 19690519 199803 2 001 Pembina (IV/a) Kabid E- Government	Imas Rosidah, SP NIP. 19710919 200701 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b) Pelaksana	
	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
28	2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intern Pemerintah Daerah	Dian Istanti, S.Sos., M.AP NIP. 19690519 199803 2 001 Pembina (IV/a) Kabid E- Government	Imas Rosidah, SP NIP. 19710919 200701 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b) Pelaksana	
29	01.01	UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Ai Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			

NO	KODE REKENING KEHATAN	NAMA KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGESAHAN PEMBANTU
			NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.
1	2	3	4	5	6
30.	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	AI Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
31.	2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	AI Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
32.	2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	AI Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
33.	2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	AI Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
34.	2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	AI Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
35.	2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	AI Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	

NO	KODE REKENING KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.
1	2	3	4	5	6
36	2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820528 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Ai Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	

NO	KODE REKENING KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.
1	2	3	4	5	6
37	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Ai Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
	2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
38	2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Ai Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
39	2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Ai Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
	2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			
41	01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Ai Popon Hernawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			
	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
	2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			

NO	KODE REKENING KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.
1	2	3	4	5	6
42	2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Agi Agung Galuh Purwa, S.STP., MSc., M.P.A NIP. 19820628 200112 1 002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Al Popon Hermawati NIP. 19710503 200701 2 009 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
	2.20.02 2.20.02.1.01	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			
43	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Hj. Ida Ningrum, S.Si., M.Pd NIP. 19720312 199803 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b) Kabid Statistik	Rani Fardiani NIP. 19760818 200801 2 010 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
44	2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Hj. Ida Ningrum, S.Si., M.Pd NIP. 19720312 199803 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b) Kabid Statistik	Rani Fardiani NIP. 19760818 200801 2 010 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
45	2.20.02.1.01.03	Memangun Metadata Statistik Sektoral	Hj. Ida Ningrum, S.Si., M.Pd NIP. 19720312 199803 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b) Kabid Statistik	Rani Fardiani NIP. 19760818 200801 2 010 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
46	2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Hj. Ida Ningrum, S.Si., M.Pd NIP. 19720312 199803 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b) Kabid Statistik	Rani Fardiani NIP. 19760818 200801 2 010 Pengatur Tingkat I (II/d) Pelaksana	
	2.21.02 2.21.02.1.01	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
47	2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tiomaida Seviana Hasnidawati H, SH., M.AP NIP. 19700915 199603 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	Maemunah NIP. 19680419 199003 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b) Pelaksana	

NO	KODE REKENING KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL.
1	2	3	4	5	6
48	2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tiomaida Sevlana Hasnidawati H, SH., M.AP NIP. 19700915 199603 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	Maemunah NIP. 19680419 199003 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b) Pelaksana	
49	2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non elektronik	Tiomaida Sevlana Hasnidawati H, SH., M.AP NIP. 19700915 199603 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	Maemunah NIP. 19680419 199003 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b) Pelaksana	
50	2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tiomaida Sevlana Hasnidawati H, SH., M.AP NIP. 19700915 199603 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	Maemunah NIP. 19680419 199003 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b) Pelaksana	
51	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Tiomaida Sevlana Hasnidawati H, SH., M.AP NIP. 19700915 199603 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	Maemunah NIP. 19680419 199003 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b) Pelaksana	
	2.21.02.1.02.01	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			


 Otorisasi
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
 DR. JANNI HAYATI ADAM, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690420 198803 2 004

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL